



Evaluasi Program Bus Wisata *Heritage* Bandar Grissee Dalam Mendukung Pengembangan Wisata *Heritage* Gresik

Nurhayati¹, Ahmad Zaki², Oktavia Kurnia Ramadhani³, Nia Nur Qur'any Agustin⁴, Tauran⁵, Wilda Sumarsyah⁶

^{1,2,3,4,5,6} S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

¹24040674170@mhs.unesa.ac.id, ²24040674182@mhs.unesa.ac.id, ³24040674198@mhs.unesa.ac.id,

⁴24040674200@mhs.unesa.ac.id, ⁵tauran@unesa.ac.id, ⁶wildasumarsyah@unesa.ac.id

Abstract

This study aims to evaluate the implementation of the Bandar Grissee Heritage Tourism Bus Program in supporting the development of heritage tourism destinations in Gresik Regency. The program was introduced as a public service innovation to improve accessibility between heritage tourism destinations spread across the Bandar Grissee area. The study employed a formal evaluation approach with a formative evaluation type and referred to William N. Dunn's six policy evaluation criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The research used a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the program has had a positive impact on increasing tourist numbers and improving tourism accessibility. However, the implementation still faces several challenges, such as limited fleet capacity, suboptimal service digitalization, low operational efficiency, and unequal accessibility for vulnerable groups and destinations with narrow road infrastructure. Overall, the Bandar Grissee Heritage Tourism Bus Program is considered sufficiently effective and appropriate as a heritage tourism transportation solution, but it still requires improvements in service integration, fleet capacity enhancement, digital system implementation, and the strengthening of an inclusive and sustainable tourism mobility concept in order to achieve regional tourism development goals optimally.

Keywords: Policy Pvaluation, Heritage Tourism, Tourism Transportation, Bandar Grissee, Tourism Accessibility, Tourism Development.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Bus Wisata *Heritage* Bandar Grissee dalam mendukung pengembangan destinasi wisata warisan di Kabupaten Gresik. Program ini disusun sebagai inovasi dalam layanan publik untuk meningkatkan aksesibilitas di antara destinasi wisata *heritage* yang terdapat di wilayah Bandar Grissee. Penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi resmi dengan jenis evaluasi formatif serta merujuk pada enam kriteria evaluasi kebijakan yang diajukan oleh William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan akurasi. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa program tersebut telah membawa dampak positif terhadap kenaikan jumlah pengunjung dan kemudahan akses layanan wisata. Namun, pelaksanaan program masih mengalami berbagai tantangan, seperti jumlah armada yang terbatas, digitalisasi layanan yang belum maksimal, efisiensi operasional yang rendah, serta aksesibilitas yang belum merata untuk kelompok rentan dan lokasi dengan infrastruktur jalan yang sempit. Secara keseluruhan, Program Bus Wisata *Heritage* Bandar Grissee dianggap efektif dan relevan sebagai solusi transportasi wisata *heritage*, namun masih membutuhkan pengembangan dalam aspek integrasi layanan, peningkatan kapasitas armada, penerapan sistem digital, dan penguatan konsep mobilitas wisata yang inklusif serta berkelanjutan agar tujuan pengembangan pariwisata lokal dapat dicapai secara optimal.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Wisata *Heritage*, Transportasi Wisata, Bandar Grissee, Aksesibilitas Wisata, Pengembangan Pariwisata.

1. Pendahuluan

Perkembangan sektor pariwisata saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai aktivitas rekreasi semata, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai aspek, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan identitas wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu pariwisata yang mengalami perkembangan dan sedang tren dalam beberapa tahun terakhir adalah wisata *heritage* atau wisata berbasis warisan sejarah dan budaya. Wisata *heritage* sendiri tidak hanya memiliki fokus pada pemanfaatan bangunan atau situs bersejarah sebagai objek wisata, tetapi juga menjadi upaya untuk mempertahankan identitas budaya, nilai historis, serta karakter daerah di tengah perubahan dan perkembangan zaman. Menurut UNESCO (2009), daerah yang memiliki kawasan *heritage* berpotensi memperkuat karakter destinasi, menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas, serta mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata *heritage* karena memiliki sejarah panjang sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan sejak masa lampau yang pernah menjadi pusat aktivitas perdagangan dan penyebaran agama di Pulau Jawa, Gresik menyimpan berbagai peninggalan sejarah berupa bangunan kolonial, kawasan permukiman multietnis, hingga situs religi yang masih terjaga sampai saat ini. Potensi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan revitalisasi kawasan Gresik Kota Lama menjadi kawasan wisata Bandar Grisee yang dikembangkan dengan mengangkat nilai sejarah, budaya, dan keberagaman etnis yang telah lama berkembang di wilayah tersebut.

Kawasan Bandar Grisee terdiri atas beberapa titik destinasi seperti Kampung Kemas, Kampung Arab, kawasan Pecinan, serta berbagai kampung tematik lainnya yang memiliki karakteristik dan daya tarik yang berbeda. Namun, pola persebaran destinasi yang tidak terpusat dalam satu lokasi menyebabkan wisatawan perlu berpindah dari satu titik ke titik lainnya untuk memperoleh pengalaman wisata secara menyeluruh (Sari, 2020). Keadaan tersebut mempengaruhi mobilitas pengunjung dan juga berpotensi mengurangi kualitas pelayanan wisata yang diterima.

Karakteristik kawasan Bandar Grisee yang terdiri dari beberapa titik destinasi yang terpisah jauh menyebabkan pengunjung sering mengalami kesulitan saat ingin mengakses seluruh lokasi wisata dalam satu kali kunjungan. Di samping itu, beberapa tempat wisata seperti Kampung Kemas dan Rumah Gajah Mungkur memiliki jalur akses yang cukup sempit, sehingga menyulitkan kendaraan tertentu untuk mencapai lokasi tersebut. Keadaan ini dapat berdampak pada kenyamanan pengunjung dan secara tidak langsung mempengaruhi pengalaman liburan yang diterima oleh wisatawan. Masalah aksesibilitas di sektor pariwisata tidak hanya menyangkut ketersediaan moda transportasi, tetapi juga terkait dengan kemampuan layanan yang disediakan untuk menciptakan kemudahan, efisiensi, dan pengalaman yang lebih memuaskan bagi para pengguna layanan wisata. Aksesibilitas adalah salah satu elemen krusial dalam pengembangan destinasi wisata karena berdampak pada kemudahan mobilitas pengunjung, tingkat kepuasan, serta minat untuk berkunjung kembali (Delamartha, Yudana, & Rini, 2021). Selain itu, keadaan jaringan jalan, konektivitas antara destinasi, serta tersedianya moda transportasi yang memadai juga merupakan faktor penting dalam mendukung kualitas pengalaman wisatawan saat melakukan perjalanan wisata.

Sebagai bentuk upaya mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga menghadirkan Program Bus Wisata Bandar Grisee yang mulai beroperasi pada tahun 2024. Kehadiran program ini bukan hanya berfungsi sebagai sarana transportasi wisata, tetapi juga menjadi salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata daerah. Program Bus Wisata Bandar Grisee dirancang untuk menghubungkan berbagai titik destinasi wisata *heritage* dalam satu layanan yang terintegrasi sehingga wisatawan dapat memperoleh pengalaman wisata yang lebih mudah dan nyaman. Selain itu, keberadaan program ini juga memperlihatkan adanya perubahan orientasi pelayanan publik yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi pelayanan yang lebih berfokus pada kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rosyada dan Meirinawati (2024), yang menyatakan bahwa inovasi pelayanan publik dalam sektor pariwisata dapat menjadi strategi dalam memperkuat daya tarik destinasi melalui peningkatan aksesibilitas, atraksi, dan promosi wisata.

Upaya penyediaan layanan program Bus Wisata Bandar Grisee yang dikembangkan sebagai sarana transportasi wisata sekaligus bagian dari inovasi pelayanan publik di sektor pariwisata diharapkan dapat menghubungkan berbagai titik destinasi yang tersebar di kawasan Bandar Grisee sehingga wisatawan dapat memperoleh pengalaman wisata yang lebih baru dan menarik. Namun dalam pelaksanaannya, penyediaan layanan transportasi wisata tidak hanya berkaitan dengan tersedianya sarana angkutan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan program dalam menjawab kebutuhan pengguna layanan secara lebih luas. Berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, seperti akses menuju sejumlah lokasi wisata yang belum dapat dijangkau secara optimal karena karakteristik jalan yang relatif sempit, sistem layanan digital yang masih belum dimanfaatkan secara maksimal, serta pola penggunaan layanan yang masih didominasi melalui pemesanan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bus Wisata Bandar Grisee dan melihat sejauh mana program tersebut mampu mendukung pengembangan pariwisata lokal di Kabupaten Gresik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan pendekatan evaluasi formal berdasarkan panduan dari Dunn (2018), untuk memberikan gambaran yang mendalam, sistematis, serta objektif tentang pelaksanaan Program Bus Wisata *Heritage* Bandar Grisee, tanpa memanipulasi data yang ada. Jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif karena dilaksanakan saat program masih berlangsung. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menganalisis logika intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dan untuk menilai apakah fungsi layanan bus benar-benar menjadi penghubung antar destinasi wisata atau hanya sekedar menjadi inovasi yang bersifat simbolis. Evaluasi ini merujuk pada dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9212>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Kabupaten Gresik untuk periode 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik untuk tahun 2024-2026.

Kinerja program diukur melalui adaptasi enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2018), yang diaplikasikan dalam konteks transportasi pariwisata daerah. Kriteria tersebut mencakup: efektivitas (peningkatan jumlah pengunjung), efisiensi (perbandingan antara biaya operasional dan pemanfaatan), kecukupan (ketersediaan armada dan jalur), pemerataan (aksesibilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas), responsivitas (tanggapan pemerintah terhadap keluhan pengguna), dan ketepatan (kesesuaian program dalam mengatasi masalah kemacetan serta keterbatasan tempat parkir di daerah kota tua).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi partisipatif terhadap operasional bus, serta wawancara mendalam dengan pihak Disparekrabudpora Kabupaten Gresik, pengelola Pokdarwis, dan penumpang. Di sisi lain, data sekunder dikumpulkan melalui kajian dokumentasi yang meliputi Perda Kabupaten Gresik No. 2 Tahun 2021, RKPD 2024-2026, statistik jumlah penumpang untuk periode 2024 hingga 2025, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 yang berkaitan dengan standar aksesibilitas dalam sektor pariwisata.

Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dengan cara interaktif mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Proses ini melalui beberapa tahapan, termasuk pengumpulan data, reduksi data untuk memilih indikator yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis atau tabel, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis evaluatif dilaksanakan dengan membandingkan realitas di lapangan berdasarkan enam kriteria dari Dunn dengan target kebijakan yang ada dalam RPJMD 2021-2026 dan RKPD 2026. Proses akhir ini menghasilkan penilaian induktif mengenai tingkat keberhasilan integrasi destinasi wisata serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih mendalam terkait aspek inklusivitas fisik dan jangkauan operasional bus.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Kerangka Evaluasi Formatif

Sesuai dengan pendekatan evaluasi resmi dan tipe evaluasi formatif yang diterapkan dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi empiris pelaksanaan Program Bus Wisata *Heritage* Bandar Grissee dengan standar kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Standar ini merujuk pada dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD, serta peraturan nasional di sektor pariwisata. Evaluasi ini menerapkan kriteria yang diusulkan oleh Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Setiap kriteria diimplementasikan dalam indikator tertentu, lalu dibandingkan dengan standar kebijakan dan praktik terbaik (*best practice*), untuk kemudian diberikan penilaian (*judgement*) secara evaluatif. Oleh karena itu, analisis tidak hanya mencerminkan keadaan pelaksanaan program, namun juga mengevaluasi sejauh mana program tersebut mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

3.2. Hasil Evaluasi Berdasarkan Kriteria

3.2.1. Efektivitas

Efektivitas program diukur berdasarkan sejauh mana Program Bus Wisata dapat meningkatkan aksesibilitas serta jumlah pengunjung wisata di daerah warisan Bandar Grissee. Berdasarkan informasi yang ada, jumlah pengguna layanan meningkat dari sekitar 6.780 penumpang di tahun 2024 menjadi 9.250 penumpang di tahun 2025. Ini menandakan adanya tanggapan baik dari masyarakat terhadap layanan yang tersedia. Meskipun demikian, kenaikan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas yang ideal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya area layanan, di mana beberapa tempat wisata tidak dapat dijangkau oleh bus karena kondisi infrastruktur jalan yang sempit. Dalam sudut pandang kebijakan pariwisata, efektivitas tidak hanya dinilai dari pertambahan jumlah pengunjung, tetapi juga dari kemampuan sistem untuk mengintegrasikan semua elemen destinasi wisata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program ini cukup berhasil, tetapi belum mencapai tingkat efektivitas yang maksimal karena masih ada keterbatasan dalam integrasi layanan di antara destinasi.

3.2.2. Efisiensi

Efisiensi program berhubungan dengan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk menghasilkan hasil layanan. Program Bus Wisata Bandar Grissee dilaksanakan secara terbatas, hanya di akhir pekan dengan jumlah perjalanan tertentu. Walaupun bus memiliki kapasitas sekitar 40 penumpang, penggunaan layanan masih didominasi oleh beberapa kelompok tertentu, seperti siswa dan kelompok wisata edukasi.

Keadaan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan sumber daya belum maksimal, terutama bila dikaitkan dengan frekuensi operasional yang sedikit. Dalam sudut pandang manajemen publik, efisiensi mengharuskan penggunaan sumber daya secara optimal agar dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, program ini dapat dianggap tidak efisien, karena tingkat penggunaan layanan belum mencerminkan potensi sumber daya yang ada.

3.2.3. Kecukupan

Kecukupan program berkaitan dengan sejauh mana program dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang disediakan. Dalam konteks ini, hal utama yang ingin dijawab adalah keterjangkauan antara lokasi-lokasi wisata yang tersebar di area Bandar Grissee. Hasil evaluasi mengindikasikan bahwa jumlah armada yang ada masih minim dan belum dapat menjangkau semua lokasi destinasi wisata. Situasi ini membuat layanan yang tersedia belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan untuk mengakses semua area secara terpadu. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kecukupan program masih rendah, karena belum dapat memberikan solusi yang menyeluruh terhadap masalah aksesibilitas yang mendasari kebijakan.

3.2.4. Pemerataan

Ruang lingkup pemerataan menilai sejauh mana akses layanan dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat dengan adil. Dari sudut pandang ekonomi, program ini dianggap inklusif karena biaya tiket yang diberikan cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp3.000 untuk pelajar dan Rp5.000 untuk masyarakat umum. Kebijakan tarif ini bertujuan untuk memastikan bahwa latar belakang ekonomi tidak menjadi halangan bagi masyarakat dalam menikmati sarana wisata publik.

Namun, ketika dilihat dari aspek akses fisik dan inklusivitas, evaluasi menunjukkan adanya ketidakmerataan yang signifikan. Desain bus tingkat yang saat ini digunakan masih belum menerapkan prinsip desain universal. Tanpa curam menuju lantai atas merupakan rintangan utama bagi lansia serta anak-anak. Selain itu, fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas, seperti ramp otomatis untuk kursi roda, belum tersedia pada armada ini.

Selain tantangan fisik pada kendaraan, faktor geografis dan infrastruktur jalan yang terbatas juga menambah ketidakadilan akses di wilayah tertentu. Bus besar yang tidak dapat menjangkau area sempit seperti Kampung Kemasan atau Rumah Gajah Mungkur membuat wisatawan dengan keterbatasan fisik (baik lansia maupun penyandang disabilitas) kehilangan kesempatan untuk merasakan pengalaman wisata yang utuh di lokasi-lokasi tersebut. Sementara para wisatawan yang lebih muda dan sehat dapat melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, kelompok rentan terpaksa harus tetap di titik pemberhentian utama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun program ini telah berhasil dalam aspek pemerataan ekonomi, namun dari segi fungsi, program ini belum sepenuhnya inklusif karena masih terdapat hambatan akses yang dialami oleh kelompok rentan serta terdapat batasan jangkauan wilayah.

3.2.5 Responsivitas

Responsivitas program mencerminkan kapasitas pemerintah untuk merespons kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini telah memperlihatkan adanya usaha pengembangan, seperti penyediaan paket *tour* terintegrasi yang memberikan nilai lebih bagi pengunjung. Namun, aspek digitalisasi layanan masih belum maksimal, khususnya terkait sistem pemesanan tiket dan penyediaan informasi secara online. Namun, dalam praktik terbaik pengelolaan pariwisata terkini, digitalisasi menjadi faktor krusial dalam meningkatkan mutu layanan. Oleh karena itu, program ini dapat dianggap cukup responsif, tetapi belum sepenuhnya adaptif terhadap kemajuan teknologi.

3.2.6. Ketepatan

Ketepatan program berhubungan dengan kecocokan antara permasalahan yang dihadapi dan solusi yang disediakan melalui kebijakan. Dalam konteks ini, Program Bus Wisata Bandar Grissee dibuat untuk mengatasi masalah aksesibilitas di area wisata yang memiliki karakteristik yang tersebar. Secara konseptual, program ini adalah jawaban yang tepat karena menawarkan sarana transportasi yang menghubungkan berbagai tujuan. Namun, dalam pelaksanaannya, terbatasnya jangkauan layanan membuat program belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program ini secara konsep sudah tepat, tetapi implementasinya masih belum sepenuhnya akurat.

3.3. Rekapitulasi Evaluasi

Tabel 1. Tabel Rekapitulasi Evaluasi Program Bus Wisata *Heritage* Bandar Grissee

Kriteria	Indikator	Standar Keberhasilan	Contoh Capaian	<i>Judgment</i>
Efektivitas	- Peningkatan jumlah pengguna - keterhubungan antar destinasi wisata	- Terjadi peningkatan signifikan jumlah wisatawan - Seluruh destinasi wisata terintegrasi	- Jumlah pengguna meningkat dari ± 6.780 (2024) menjadi ± 9.250 (2025)	Cukup Efektif

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9212>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

	- Peningkatan kunjungan wisata	dalam satu sistem layanan - Mendukung target peningkatan daya tarik wisata daerah (RPJMD)	- Namun belum semua destinasi dapat dijangkau karena keterbatasan akses jalan	
Efisiensi	- Rasio kapasitas bus dengan jumlah penumpang - Frekuensi operasional layanan - Pemanfaatan sumber daya	- Tingkat keterisian bus optimal (load factor tinggi) - Operasional berjalan rutin dan konsisten - Sumber daya dimanfaatkan secara maksimal	- Bus berkapasitas ±40 penumpang - Operasional hanya akhir pekan (frekuensi terbatas) - Pemanfaatan belum optimal	Tidak Efisien
Kecukupan (<i>Adequacy</i>)	- Jumlah armada bus - Cakupan rute layanan - Kemampuan memenuhi kebutuhan mobilitas wisatawan	- Jumlah armada memadai untuk melayani permintaan - Rute menjangkau seluruh destinasi utama - Layanan mampu menjawab kebutuhan aksesibilitas kawasan	- Jumlah armada terbatas - Tidak semua titik wisata terjangkau - Layanan belum memenuhi kebutuhan mobilitas secara menyeluruh	Kurang memadai
Pemerataan (<i>Equity</i>)	- Keterjangkauan harga tiket - Akses untuk berbagai kelompok masyarakat - Aksesibilitas fisik layanan	- Harga terjangkau untuk semua kalangan - Layanan inklusif (ramah lansia/disabilitas) - Tidak ada hambatan akses antar wilayah	- Harga tiket Rp3.000–Rp5.000 (terjangkau) - Dominan digunakan pelajar/rombongan - Akses terbatas di beberapa lokasi (jalan sempit)	Cukup Merata Secara Ekonomi Namun Rendah pada aspek Inklusivitas
Responsivitas	- Adaptasi terhadap kebutuhan wisatawan - Pengembangan layanan (paket wisata) - Digitalisasi layanan	- Layanan berkembang sesuai kebutuhan pengguna - Tersedia inovasi (paket wisata, integrasi layanan) - Sistem digital (booking, informasi) berjalan baik	- Tersedia paket wisata terintegrasi - Sistem digital (tiket online, informasi) belum optimal	Cukup Responsif
Ketepatan (<i>Appropriateness</i>)	- Kesesuaian program dengan masalah aksesibilitas - Dampak terhadap mobilitas wisata	- Program menjadi solusi utama atas masalah aksesibilitas - Memberikan pengalaman wisata terintegrasi	- Program membantu mobilitas wisatawan - Namun belum menjangkau seluruh destinasi → solusi belum optimal	Tepat, namun belum optimal

3.4 Pembahasan Dalam Perspektif Pengembangan Pariwisata

Program Bus Wisata *Heritage* Bandar Grisee sejatinya dibuat untuk memenuhi beberapa tujuan pokok dalam pembangunan daerah, yaitu meningkatkan aksesibilitas antar destinasi wisata, memperbaiki kualitas pengalaman wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berfokus pada pariwisata. Dalam perspektif teori pengembangan pariwisata, pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi oleh integrasi antara tiga elemen utama, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (Cooper et al., 2008). Dengan demikian, hadirnya layanan bus wisata sebagai moda transportasi dapat dipahami sebagai upaya kebijakan yang menekankan peningkatan aspek aksesibilitas dalam sistem pariwisata di daerah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas telah menunjukkan kemajuan, yang dapat dilihat dari meningkatnya pengguna layanan sebesar 36% dalam satu tahun terakhir. Namun, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa pencapaian ini masih setengah jalan. Terbatasnya jangkauan bus besar ke jalur-jalur *heritage* yang sempit, seperti di Kampung Kemas, menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem transportasi yang ada. Mengacu pada Leiper (1979), sebuah sistem pariwisata yang efisien harus memiliki hubungan yang solid antara elemen-elemen geografis dari destinasi. Dengan demikian, ketidakmampuan untuk mengintegrasikan semua titik warisan secara menyeluruh mengindikasikan bahwa fungsi program masih bersifat terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diterapkannya konsep konektivitas terakhir, seperti menyediakan moda pengumpan yang lebih kecil atau berkelanjutan misalnya sepeda listrik atau becak wisata yang terstandarisasi agar wisatawan dapat mengakses lokasi yang lebih dalam tanpa kendala geografis.

Selanjutnya, terkait dengan tujuan peningkatan kualitas pengalaman berwisata, program ini telah berkontribusi melalui penyediaan layanan wisata yang berbasis pengalaman, seperti keberadaan pemandu dari Pokdarwis yang menjelaskan sejarah saat perjalanan berlangsung. Ini sejalan dengan konsep pariwisata pengalaman, di mana pengunjung tidak sekadar melakukan perjalanan fisik, tetapi juga mendapatkan nilai pendidikan. Walau demikian, kelemahan dalam sistem layanan, seperti digitalisasi yang belum optimal dan jadwal operasional yang terbatas, menunjukkan bahwa kualitas pengalaman wisata yang dihasilkan belum sepenuhnya memuaskan.

Di sisi lain, dalam kerangka pengembangan ekonomi lokal, program ini telah menunjukkan dampak awal berupa peningkatan aktivitas pariwisata yang berdampak pada pergerakan ekonomi di sekitar area wisata, terutama untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Namun, karena cakupan layanan yang masih terbatas dan belum terintegrasi sepenuhnya, dampak ekonomi yang dihasilkan cenderung belum tersebar merata di seluruh wilayah destinasi.

Dibandingkan dengan pengelolaan transportasi wisata di wilayah lain, sistem yang efisien biasanya dicirikan oleh integrasi layanan yang lebih komprehensif, baik melalui variasi moda transportasi, peningkatan rute, maupun penerapan teknologi digital dalam sistem pemesanan dan informasi. Dalam konteks ini, Program Bus Wisata Bandar Grisee masih berada pada fase pengembangan awal, sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi standar integrasi sistem pariwisata yang optimal. Untuk mencapai tujuan kebijakan sesuai dengan target RKPDP 2026, perlu adanya perubahan paradigma dari sekadar menyediakan "alat transportasi" menjadi penyediaan "sistem mobilitas pariwisata" yang terpadu, inklusif, dan berbasis teknologi. Dengan cara ini, kesenjangan antara proses perancangan kebijakan dan kenyataan di lapangan dapat diminimalkan, sehingga manfaat dari potensi besar Bandar Grisee sebagai warisan dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meski Program Bus Wisata Bandar Grisee telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan kebijakan yang ada, terutama dalam hal peningkatan aksesibilitas dan pengalaman wisata, tetapi tingkat pencapaiannya masih belum maksimal. Hal ini menunjukkan adanya gap antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan pada elemen kapasitas layanan, integrasi sistem, serta inovasi yang berbasis teknologi untuk mencapai tujuan program dengan lebih efektif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi Program Bus Wisata *Heritage* Bandar Grisee, dapat disimpulkan bahwa program ini secara umum sudah berjalan cukup baik, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan jumlah kunjungan wisata. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pengguna layanan dari tahun ke tahun serta kontribusinya terhadap pengalaman wisata berbasis edukasi. Namun, jika dilihat dari enam kriteria evaluasi yang sudah dijabarkan, program ini belum mencapai tingkat optimal. Efektivitas masih terbatas karena tidak semua destinasi wisata dapat dijangkau. Dari sisi efisiensi dan kecukupan, pemanfaatan sumber daya dan jumlah armada masih belum maksimal. Pemerataan akses juga belum sepenuhnya tercapai akibat kendala infrastruktur. Selain itu, responsivitas program sudah mulai terlihat melalui inovasi paket wisata, tetapi masih lemah dalam aspek digitalisasi layanan. Sementara, dari segi ketepatan program ini sudah sesuai sebagai solusi atas masalah aksesibilitas, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, program ini tepat secara konsep tetapi masih perlu pengembangan dalam pelaksanaannya agar dapat mencapai tujuan kebijakan secara maksimal.

Reference

- Amrina Rosyada, & Meirinawati. (2024). *Kajian pengembangan wisata Bandar Grisee untuk menyiapkan strategi promosi wisata heritage di Kabupaten Gresik*. Publika, 12(2), 435–450. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n2.p435-450>
- BAPPEDA Kabupaten Gresik. (2024). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2024: Penguatan SDM yang Unggul, Berkemajuan dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah*. BAPPEDA Kabupaten Gresik.
- BAPPEDA Kabupaten Gresik. (2025). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025: Peningkatan Daya Saing Wilayah Serta Terjaminnya Pemerataan Pembangunan Antar Sektor, Antar Wilayah dan Antar Desa*. BAPPEDA Kabupaten Gresik.
- BAPPEDA Kabupaten Gresik. (2026). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026: Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat*. BAPPEDA Kabupaten Gresik.
- Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). *Tourism: Principles and Practice*. Pearson Education.
- Delamartha, A., Yudana, G., & Rini, E. F. (2021). *Kesiapan aksesibilitas wisata dalam mengintegrasikan obyek wisata (Studi kasus: Karanganyar bagian timur)*. Jurnal Plano Buana, 1(2), 78–91. <https://doi.org/10.36456/jpb.v1i2.3229>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Fuadi, B. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik Persentuhan Antarbudaya dalam Tata Ruang Perkotaan di Gresik*. JIPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v4i1.111>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020–2024*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 848.
- Leiper, N. (1979). *The Framework of Tourism: Towards a Definition of Tourism, Tourist, and the Tourist Industry*. Annals of Tourism Research, 6(4), 390-407.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Pemerintah Kabupaten Gresik. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026*. Pemerintah Kabupaten Gresik.
- Sari, N. F. L., Sunjayadi, R. A., & Purnawibawa, R. A. G. (2021). *Permata di Pesisir Utara Jawa: Gresik dalam Jaringan Perdagangan Maritim Nusantara*. ReseachGate.
- Tifany, M., & Meirinawati, M. (2023). *Strategi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga, Serta Pariwisata Kota Surabaya Dalam Optimalisasi Wisata Tunjungan Romansa*. Publika, 1763-1778. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1763-1778>
- Yomi, W. G., Adnan, M. F., & Alhadi, Z. (2019). *Pengembangan objek wisata Nagari Tuo Pariangan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar*. JPSI (Journal of Public Sector Innovations), 3(1), 6–11. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n1.p6-1>